



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 180 /KPTS/XII/2023**

TENTANG

ALOKASI DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, pupuk sangat berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian, serta berkaitan dengan pengadaan penyaluran dan harga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Alokasi dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 darurat tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi,Korupsi dan Nepotisme;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupten Maluku Tenggara Barat;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 200/SR..220/M/12/2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian;
21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang atau Jasa Yang Beredar di Pasar;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 09/KPTS/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 237/KPTS/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An- Organik;
24. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 299/KPTS/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formulasi Pupuk An-Organik;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
27. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
28. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022;

- Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 519 / KPTS / MU / 2023 Tentang Alokasi Dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Maluku Utara Tahun 2024.
2. Surat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 800/SEK/132/2023 Perihal: Permohonan Pembuatan SK Alokasi dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Alokasi Dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 antar Kecamatan menurut jenis dan jumlah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV Keputusan ini.

9

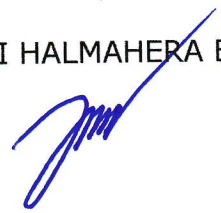
KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 pos Satker Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara dan sumber anggaran lain yang sah dan tertanggung jawab.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Ekonomi & Pemb	
Kadis. Pertanian & Ketpang	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 28 Desember 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG

Tembusan, Disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Menteri Pertanian di Jakarta,
3. Direktur Pupuk dan Pestisida Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian di Jakarta,
4. Dirut PT. Pupuk Kalimantan Timur Tbk,
5. Direksi PT. Petrokimia Gresik Tbk,
6. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
9. Camat Se-Kabupaten Halmahera Barat,

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 180 /KPTS/XII/2023
TANGGAL 28 DESEMBER 2023

TENTANG : ALOKASI DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAKABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	ALOKASI MENURUT JENIS PUPUK (Ton)		
		UREA	NPK	NPK FORMULA
1	Ibu	18,60	15,60	0
2	Ibu Selatan	14,40	9,60	0
3	Jailolo	66,90	24,10	0
4	Jailolo Selatan	14,20	17,40	0
5	Loloda	6,00	6,60	0
6	Sahu	29,50	17,80	0
7	Sahu Timur	20,10	13,60	0
8	Tabaru	12,30	12,30	0
TOTAL		182,00	117,00	0

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Ekonomi & Pemb	
Kadis Pertanian & Ketpang	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 180 /KPTS/XII/2023
TANGGAL 28 DESEMBER 2023

TENTANG : ALOKASI DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024

JENIS PUPUK : UREA

NO	KECAMATAN	TOTAL (Ton)	KEBUTUHAN PUPUK (Ton)											
			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
1	Ibu	18,6	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
2	Ibu Selatan	14,4	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
3	Jailolo	66,9	5,58	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,57
4	Jailolo Selatan	14,2	1,18	1,18	1,20	1,18	1,18	1,18	1,20	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
5	Loloda	6,0	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
6	Sahu	29,5	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,50	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,50
7	Sahu Timur	20,1	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
8	Tabaru	12,3	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
TOTAL		182	15,16	14,13	14,15	14,13	14,13	14,18	14,16	14,14	14,14	14,14	14,14	14,18

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Ekonomi & Pemb	
Kadis Pertanian & Ketpang	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 180 /KPTS/XII/2023
TANGGAL 28 DESEMBER 2023

TENTANG : ALOKASI DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024
JENIS PUPUK : NPK

NO	KECAMATAN	TOTAL (Ton)	KEBUTUHAN PUPUK (Ton)											
			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
1	Ibu	15,60	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
2	Ibu Selatan	9,60	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	Jailolo	24,10	2,00	2,00	2,00	2,10	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
4	Jailolo Selatan	17,40	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
5	Loloda	6,60	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
6	Sahu	17,80	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,50	1,50
7	Sahu Timur	13,60	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,15	1,13	1,20
8	Tabaru	12,30	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
TOTAL		117,00	9,73	8,71	8,71	8,81	8,71	8,71	8,71	8,71	8,71	8,73	8,73	8,80

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Ekonomi & Pemb	
Kadis Pertanian & Ketpang	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

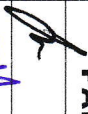
JAMES UANG

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 180 /KPTS/XII/2023
TANGGAL 28 DESEMBER 2023

TENTANG : ALOKASI DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024

JENIS PUPUK : NPK FORMULA

NO	KECAMATAN	TOTAL (kg)	KEBUTUHAN PUPUK (kg)											
			JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
1	Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Ibu Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Jailolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Jailolo Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Loloda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Sahu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Sahu Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Tabaru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Ekonomi & Pemb	
Kadis Pertanian & Ketpang	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG